

DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, Dinda Lestari dan Muridah Isnawati, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat". *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, diakses pada 29 Juli 2024, dapat diakses melalui link <http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/6907>.
- Djamali, Abdoel, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dumais, Gabriel Alvaro David dan Rahaditya, R, 2023, "Implementasi Pemberatan Pemidanaan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila". *UNES Law Review*, Vol. 5 No.4 hlm. 2974-2982, dapat diakses melalui link <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.629>.
- Hakim, lukman, 2020, *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish.
- Henry, Arianto, 2012, "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 9 No. 3, diakses pada 8 Agustus 2024, dapat diakses melalui link <https://www.neliti.com/publications/18014/>.
- Joko Trianto, 2018, "Persamaan Didepan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP yang Dilakukan oleh Prajurit TNI dengan Warga Sipil terkait Penegakan Hak Asasi Manusia", *Lex Et Societatis* Vol. VI No 1, diakses pada 28 juli 2024, dapat diakses melalui link <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/563575>
- Kambu, Wari Martha, 2021, "Tinjauan Yuridis tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Et Societatis* IX: 137. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.
- Marianus, Efraim Theo, 2013, "Akibat Hukum terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa di Pengadilan. *Lex Crimen*, 2(6), dapat diakses melalui link <https://www.neliti.com/publications/3094/>.
- Moeljatno, 2008, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Monteiro, Josef, 2007, "Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia",

Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25 No. 2, dapat akses melalui link <https://www.neliti.com/publications/13095/> .

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Pers: Mataram Nusa Tenggara Barat.

Mufti, Khakim, 2017, “Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum”, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan*, Tahun III, dapat diakses melalui link <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/9925> .

Pawennei Mulyati dan Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana (1)*, Jakarta: Mitra Wacana Media

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Rusianto, Agus, 2018, *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi Antara asas, teori dan penerapannya*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Siddiq Muhammad, 2022, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Soerjowinoto, Petrus dkk.2020. *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Unika Soegijapranata.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1, Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto.

Suliastini, Rina, 2013, "Tinjauan Mengenai Penggunaan Hak Ingkar dan Saksi A De Charge dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Nomor: 152/Pid. B/2011/Pn. P Bkn), "*Jurnal Verstek*, Vol 1 No.2, dapat diakses melalui link <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38809/25687>.

Suryawan,dkk, 2020, *Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI*. Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP), 10(2).

Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research) (2)*, Jakarta: Sinar Grafika,

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana Final*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm.37-40.

Wila Wahyuni, Mengenal Persamaan kedudukan Warga Negara dalam Undang-undang", Hukum online 17 Februari 2022, online, internet, 1 juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-warga-negara-dalam-undang-undang-lt620e1f31c663f/?page=2>